

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan terus menjadi perhatian utama pemerintah di setiap negara belahan dunia manapun. Kemiskinan tetap menjadi isu krusial dalam berbagai aspek keberhasilan negara, terutama di negara berkembang. Indonesia menyadari urgensi penanganan kemiskinan dan terus mengupayakan target penurunan tahunan melalui berbagai kebijakan pemerintahan (Afina, 2020).

Keterbatasan ekonomi menghambat pemenuhi kebutuhan dasar, yang menjadi ciri utama kemiskinan. Ketidaksetaraan pendapatan memicu variasi standar hidup antar kelompok masyarakat, hubungan erat terjalin antar kemiskinan dengan standar hidup minimum, dimana ketidakrataan pendapatan semakin memperlebar perbedaan kesejahteraan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketika kebutuhan dasar tidak mampu dipenuhi oleh individu. Kesulitan rumit ini mendorong berbagai upaya lebih lanjut (Alifa and Imaningsih, 2023).

Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan mengurangi tekanan ekonomi dengan menjamin akses terhadap hak-hak dasar secara layak (Gyska,2019). Keberhasilan pengetasan kemiskinan ditandai oleh penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan individu, serta penguatan daya beli masyarakat. Pencapaian keberhasilan tentu tidak ditentukan oleh sektor tunggal semata, tetapi melibatkan seluruh sektor pembangunan. Sehingga, seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sedang dan akan dilaksanakan harus memberikan kontribusi positif dengan memiliki wawasan menyeluruh dalam upaya mengatasi kemiskinan(Yuniatin, 2024).

Provinsi Jawa Timur termasuk padat penduduk di Pulau Jawa sekaligus pusat perekonomian nasional. Namun perkembangan ekonomi dan kondisi sosial antar wilayahnya menunjukkan perkembangan yang berbeda. Perbedaan tersebut mendasari pengelompokan wilayah berdasarkan berbagai kriteria, meliputi potensi ekonomi, konektivitas infrastruktur, karakteristik sosial budaya, serta strategi pengintegrasian pertumbuhan wilayah dengan tujuan mengurangi disparitas wilayah, pada Perda Provinsi Jawa Timur No. 10 tahun 2023 mengenai RTRW Jawa Timur 2023-2043. Ketimpangan perkembangan wilayah tersebut terlihat pada perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayahnya.

**Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024**



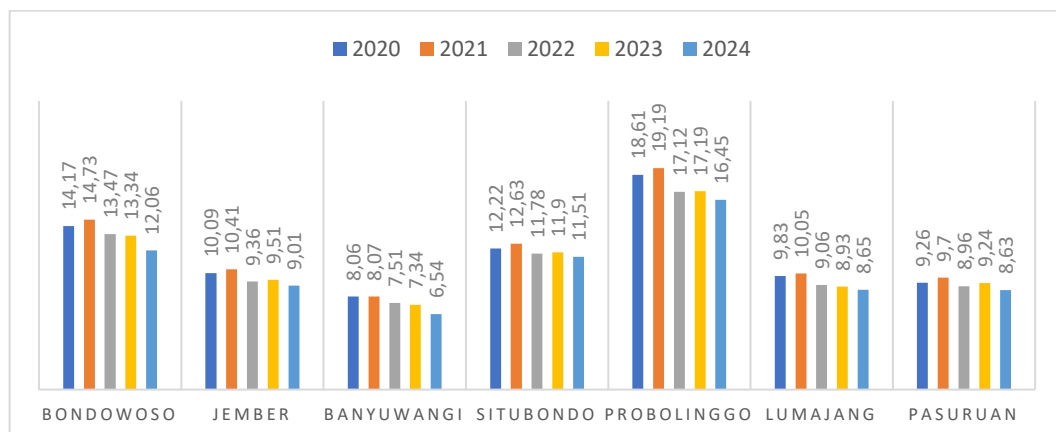
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat rata-rata persentase kemiskinan 5 wilayah strategis Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024 menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Wilayah Tapal Kuda secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, meskipun cenderung mengalami penurunan di setiap tahun. Sebaliknya, Wilayah Malang Raya

menunjukkan tingkat kemiskinan paling rendah, diikuti Wilayah Gerbangkertosusilo menempati posisi kedua terendah. Sedangkan Wilayah Pansela dan Selingkar Wilis menunjukkan rata rata tingkat kemiskinan yang cenderung fluktuasi setiap tahunnya namun masih lebih rendah dibandingkan Wilayah Tapal Kuda.

Sebutan Wilayah Tapal Kuda dikarenakan letaknya di timur Provinsi Jawa Timur dan berbentuk seperti tapal kuda di peta. Wilayah Tapal Kuda meliputi 7 Kabupaten diantaranya yaitu Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo, Lumajang, dan Pasuruan. Wilayah ini masih sering kali dianggap masih tertinggal dan terbelakang dibanding wilayah lain. Berikut data tingkat kemiskinan setiap daerah pada wilayah Tapal Kuda.

**Gambar 1. 2 Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2020-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (diolah)

Berdasarkan data pada gambar 1.2, tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda menunjukkan dinamika beragam antar kabupaten. Kabupaten Probolinggo mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Tapal Kuda sebesar 18,16% tahun 2020, mengalami puncak di tahun 2021 sebesar 19,19% sebelum menurun menjadi 16,45% pada tahun 2024. Diikuti Bondowoso dan Situbondo yang juga mencatat tingkat kemiskinan tertinggi dibawahnya. Daerah lain masih mengalami naik turun

di beberapa tahunnya. Meskipun tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda menunjukkan penurunan, keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan masih belum maksimal karena kondisinya di wilayah Tapal Kuda masih tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain.

Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai kebijakan, namun pendekatan ini masih belum menyentuh akar masalah secara mendasar. Masyarakat miskin masih menghadapi keterbatasan akses sumber daya, termasuk kualitas sumber daya manusia tercermin melalui indikator utama pendidikan. Tingkat pendidikan akan dievaluasi melalui rata-rata lama sekolah. Indikator ini menilai capaian pendidikan oleh masyarakat di suatu daerah. Pendidikan yang ditempuh berperan pada pola pikir individu dalam menghadapi masalah. Semakin lama pendidikan yang ditempuh, akan membuka harapan memperoleh kehidupan yang semakin sejahtera (Utami and Faizin, 2025).

Berdasarkan data Rata-Rata Lama Sekolah setiap daerah di Wilayah Tapal Kuda Tahun 2020 hingga 2024 terlihat adanya kecenderungan peningkatan tingkat pendidikan di setiap tahunnya. Kabupaten Bondowoso meningkat dari 5.93 di tahun 2020 menjadi 6.53 tahun pada 2024. Tren serupa terjadi di Jember yang meningkat dari 6.48 tahun menjadi 6.54 tahun. Serta Banyuwangi dari 7.16 tahun menjadi 7.78 tahun. Tren peningkatan juga terlihat pada daerah-daerah lainnya. Namun peningkatan tersebut masih tergolong lambat, Kenaikan yang terjadi setiap tahunnya relatif kecil bahkan pada beberapa daerah hanya bertambah sekitar 0.1-0.2 tahun. Peningkatan rata-rata lama sekolah berperan dalam meningkatkan kualitas SDM yang pada akhirnya mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Indikator makro melalui pertumbuhan ekonomi berguna dalam mengukur kinerja perekonomian riil di wilayah dan menjadi faktor yang dapat mengurangi kemiskinan. Dalam menurunkan kemiskinan dibutuhkan intensif pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Nasrulloh, 2025). PDRB berfungsi dalam mengukur volume barang dan jasa yang tercipta melalui kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nilai PDRB yang semakin tinggi mencerminkan penerimaan daerah yang semakin besar. Selain itu indikator tingkat kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari PDRB perkapita sebagai tolak ukur pendapatan masyarakat. (Taufiq Hidayat *et al.*, 2024).

Menurut Todaro & Smith,(2006) Pendapatan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok yang diukur melalui pendapatan perkapita. PDRB perkapita tinggi berarti meningkatnya tingkat pendapatan masyarakatnya, Apabila pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga akan mengalami penurunan. Sehingga, semakin tinggi PDRB per kapita, kesejahteraan akan semakin meningkat dan akan menurunkan kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik, Kabupaten Pasuruan memiliki PDRB tertinggi di Wilayah Tapal Kuda tahun 2020-2024. Jika dilihat dari pendapatan per kapita pada tahun 2024, hanya Kabupaten Pasuruan yang mencatat nilai tertinggi sekitar Rp6,32 juta per bulan, jauh di atas garis kemiskinan yang ditentukan sebesar Rp2.803.590. Sementara itu, Banyuwangi sebesar Rp3,03 juta per bulan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Adapun Jember sebesar Rp2,01 juta, Probolinggo sebesar Rp1,91 juta, Lumajang sebesar Rp1,89 juta, Situbondo sebesar Rp1,87 juta, dan Bondowoso sebesar Rp1,66 juta yang berada di bawah garis kemiskinan

tersebut. kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di wilayah Tapal Kuda masih memiliki kemampuan ekonomi per kapita yang relatif rendah. Bahkan, Banyuwangi yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat dikatakan masih berada pada kondisi yang mendekati ambang kemiskinan karena selisihnya relatif kecil. Di sisi lain, meskipun PDRB di seluruh wilayah Tapal Kuda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan secara merata. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDRB belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dianggap faktor penghambat kemajuan perekonomian di suatu daerah. TPT menunjukkan jumlah penganggur yang tercatat di wilayah yang berfungsi mengukur kesehatan tenaga kerja (Handayani and Suharianto, 2025). Menurut Sukirno,(2006) pengangguran berefek negatif melalui penurunan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan, kemudian meningkatkan kemiskinan.

Menurut Sukirno (2017) dalam Taufiq Hidayat et al.,(2024), jumlah angkatan kerja baru yang semakin bertambah menyebabkan pengangguran, karena penyerapan tenaga kerja tidak mengikuti peningkatan tersebut. Angka pengangguran tinggi berefek pada hilangnya pendapatan tetap yang berpotensi menekan angka kemiskinan. Sektor produktif yang kurang menyerap tenaga kerja memperburuk kemiskinan sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor pendapatan rendah (informal) akibat keterbatasan lapangan kerja formal. Penjelasan diatas mengartikan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan diatas, kemiskinan meningkat ketika pengangguran mengalami kenaikan. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak selalu yang sebenarnya terjadi. Menurut Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa Kabupaten Probolinggo dan Situbondo dengan tingkat kemiskinan tertinggi justru mengalami penurunan terhadap tingkat penganggurannya di tahun 2021 dan 2023. Tingkat pengangguran Probolinggo mengalami tren menurun dari 4,86% menjadi 3,00%, begitu juga dengan Situbondo dari 3,85% menjadi 3,15% selama periode tersebut. Sedangkan, Jember, Pasuruan, dan Banyuwangi dengan TPT tinggi justru mencatat tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan daerah lain di wilayah Tapal Kuda.

Dari uraian diatas, terdapat hal yang menarik untuk dilakukan sebuah penelitian. Rata-rata lama sekolah memang menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan yang terjadi belum sepenuhnya berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, PDRB di seluruh daerah terus meningkat selama lima tahun, akan tetapi peningkatannya tidak menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka di sebagian besar daerah cenderung menurun dengan tren fluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Penurunan TPT di daerah juga tidak bersamaan dengan menurunnya tingkat kemiskinan. Begitu sebaliknya, daerah dengan TPT lebih tinggi justru mengalami penurunan kemiskinan.

Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan berbagai faktor memengaruhi dapat tingkat kemiskinan. Dalam penelitian Ainaya and Imaningsih,(2025) Hasil menunjukkan Rata-rata lama sekolah justru berpengaruh positif signifikan. Kemudian, jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di

Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, Sulistiawan, (2023) juga melakukan penelitian serupa menunjukkan hasil bahwa Upah Minimum dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan, Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti peningkatan jumlah pengangguran cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan.

Penelitian lain oleh Aulia and Nur Asiyah,(2022) menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar fenomena statistik, melainkan kondisi nyata sulitnya masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan sebagai permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek di dalam masyarakat. Temuan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan variasi hasil antar wilayah dan masih tidak konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, penulis perlu melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Wilayah Tapal Kuda”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang, dirumuskan permasalahan berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara Rata-Rata Lama Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda?
2. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda?

3. Apakah terdapat pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Rata-Rata Lama Sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda
2. Untuk mengetahui pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda

### 1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian bertujuan memberi batas permasalahan yang diteliti agar tetap fokus dan tidak meluas dari judul penelitian. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda. Focus penelitian yang menjadi Batasan, yaitu:

1. Penelitian mencakup data kurun waktu 5 tahun, yaitu 2020-2024, pada kabupaten yang berada di wilayah Tapal Kuda meliputi Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Lumajang dan Pasuruan.
2. Variable yang dipergunakan pada penelitian adalah Tingkat Kemiskinan menjadi variabel *dependen*. Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi variabel *independen*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

### 1. Bagi Peneliti

Kontribusi yang berguna dan informasi penting diberikan untuk pengembangan penelitian, khususnya permasalahan terkait pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda.

### 2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai acuan atau masukan untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pembangunan terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Referensi dan informasi mengenai pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Wilayah Tapal Kuda diharapkan dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini oleh pihak yang akan melakukan penelitian terkait.